KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tahun 2024

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 40.500.000

Keluaran : Jumlah dokumen Renstra dan Renja : 5 Laporan

Perangkat Daerah yang disusun

Hasil : Jumlah dokumen RKA SKPD Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan dan penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Boalemo.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial tahun 2024.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup:

- 1. Penyusunan RKA APBD tahun 2024
- 2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

Tahapan kegiatan:

- 1. Menyiapkan SK Tim Penyusun
- 2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan.
- 3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan
- 4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
- 5. Rapat koordinasi internal dan eksternal

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola. D. Waktu

Pelaksanaan

Time Scheedule Kegiatan Penyusunan Perencanaan dam Penganggaran SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Perencanaan													
2	Penyusunan RKA													
3	Koordinas Internal dan Eksternal													
4	Entri RKA													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

Belanja barang dan jasa Rp. 40.500.000, Terdiri dari honorarium dan biaya perjalanan dinas luar daerah.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Tilamuta, Desember 2023

PPTK

CINDRA ABAS, SM

NIP. 19850409 201212 2 001

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp.

3.133.585.298

Keluaran : Jumlah Anggaran Gaji dan Tunjangan 35 Orang

ASN dalam setahun

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah.

2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administasi keuangan perangkat daerah

- a. Output (keluaran):
 - Terpenuhinya dana untuk kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Terpenuhinya Tunjangan Keluarga ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Jabatan ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Fungsional ASN
 - Terpenuhinya dana untuk tunjangan fungsional umum ASN
 - Terpenuhinya dana untuk tunjangan beras ASN
 - Terpenuhinya dana untuk tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN

- Terpenuhinya dana untuk pembulatan gaji ASN
- Terpenuhinya dana untuk iuran Jaminan Kesehatan ASN
- Terpenuhinya dana untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, ASN
- Terpenuhinya dana untuk Tambahan Penghasilan ASN

b. Outcam (hasil)

- Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas
- Terpenuhinya kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah selama satu Tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup:

- 1. Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo 2024
- 2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

Meteologi:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dibayarkan secara langsung (LS) melalui bendahara umum Daerah BPKAD Kabupaten Boalemo.

Time Scheedule Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Urai an	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Belanja gaji dan tunjangan ASN													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN Adalah Rp. 3.133.585.298,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Tilamuta, Desember 2023

PPTK

CINDRA ABAS

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 8.105.410

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

100%

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Alat Tulis Kantor													
2	Kertas dan Cocer													
3	Bahan Cetak													
4	Bahan Komputer													
5	Perabot Kantor													
6	Alat Listrik													
7	Makan dan Minum Tamu													
8	Jasa Kantor													
9	Tagihan Air													
10	Tagihan Listrik													
11	Kenderaan Dinas Bermotor Perorangan													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor Adalah Rp. 8.105.410,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

PPTK

CINDRA ABAS. SM

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 19.578.000

Keluaran : Jumlah Keikutsertaan dalam Rapat – 5 Kali

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

Hasil : Jumlah Anggaran

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat — Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

C. Sasaran

Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Selama Satuh Anggaran (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinai dan Konsultasi SKPD Tahun 2024 adalah Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah untuk 12 Bulan Kerja.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP Adalah Rp. 19.578.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

 PPTK

CINDRA ABAS, SM

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Kenderaan Dinas Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas

Jabatan

Rek. Kegiatan :

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang

100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 88.000.000

Keluaran : Jumlah Unit Kenderaan Perorangan 1 Unit

Dinas atau kenderaan dinas jabatan yang

tersedia

Hasil : Jumlah Anggaran

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub Pengadaan Kenderaan Dinas Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan dinas jabatan yang tersedia 2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

C. Sasaran

Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Selama Satuh Anggaran (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Pengadaan Kenderaan Dinas Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan yang tersedia Tahun 2024 adalah Terpenuhinya Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan dinas jabatan untuk 12 Bulan Kerja.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Belanja Sewa kendraan operasional Dinas jabatan (KDO)													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

 Pada Sub Pengadaan Kenderaan Dinas Perorangan Dinas atau Kenderaan dinas Jabatan Adalah Rp. 88.000.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

PPTK

CINDRA ABAS, SM

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rek. Kegiatan : 3.25.01.2.08.01

Capaian Program : Persentasi Peralatan Kerja yang 100 %

berfungsi dengan baik

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp.4.747.550

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang 100%

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan jasa surat menyurat.

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa surat menyurat selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat adalah Terpenuhinya Perlengkapan Kantor pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Amplop													
2	Kertas dan Cocer													
13	Benda Pos													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat Adalah Rp. 4.747.550,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

CINDRA ABAS

PPTK

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahSub KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rek. Kegiatan : 3.25.01.2.08.02

Capaian Program : Persentasi Peralatan Kerja yang berfungsi 100 %

dengan baik

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 89.671.333

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

100%

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik adalah Terpenuhinya Perlengkapan Kantor pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Tagihan Air													
2	Tagihan Listrik													

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Adalah Rp. 89.671.333,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

PPTK

7

NIP. 198504092012122001

CINDRA ABAS

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 38.841.805

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

100%

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Alat Tulis Kantor													
2	Kertas dan Cocer													
3	Bahan Cetak													
4	Bahan Komputer													
5	Perabot Kantor													
6	Alat Listrik													
7	Makan dan Minum Tamu													
8	Jasa Kantor													_

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor Adalah Rp. 38.841.805,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

\

PPTK

CINDRA ABAS, SM

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rek. Kegiatan : 3.25.01.2.08.04

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 289.800.000

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

100%

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantorr selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor adalah Terpenuhinya jasa Kantor pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Adalah Rp. 289.800.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

11

CINDRA ABAS, SM

PPTK

NIP. 198504092012122001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan

kenderaan dinas atau kenderaan dinas jabatan

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 24.024.000

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

100%

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

D. Ruang Lingkup

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Terpenuhinya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2024

Time Scheedule

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Bahan Bakar Minyak													
2	Pajak Kenderaan													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Adalah Rp. 24.024.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

CINDRA ABAS, SM

PPTK

NIP. 198504092012122001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota

Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan

kenderaan dinas operasional atau lapangan

Rek. Kegiatan

Capaian Program : Persentasi Pelaksanaan Penunjang 100 %

Administrasi Perkantoran

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 26.322.100

Keluaran : Persentase Peralatan Kerja yang 100%

berfungsi dengan baik

Hasil : Jumlah Anggaran :

Kelompok Sasaran : Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelakaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan 2024 dimaksudkan agar tersedianya Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

C. Sasaran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama (12 Bulan)Secara efektif dan Efisien.

D. Ruang Lingkup

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Terpenuhinya Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo tahun 2024.

E. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2024

Time Scheedule

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Bahan Bakar Minyak													
2	Pajak Kenderaan													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Dinas operasional atau lapangan Adalah Rp. 26.322.100,-

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Padang, Desember 2023

PPTK

CINDRA ABAS, SM

NIP. 198504092012122001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai,

> Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

3.25.03.2.01.02. Rek. Kegiatan

Jumlah produksi Perikanan Tangkap Capaian Program 27.359 Ton

Yang Meningkat Hasilnya

Masukan Jumlah dana yang tersedia : Rp

2.288.000.000

100%

Keluaran Presentasi Penyediaan Sarana dan

> Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya

Hasil Tersedianya Penyedian Sarana dan 100 %

prasarana pengolahan penangkapan ikan

Kelompok Sasaran : Kelompok Nelayan

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan partisipasi dan otonomi daerah yang merupakan substansi pokok, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengelola pesisir dan laut sejauh 12 mil untuk Provinsi dan 4 mil untuk daerah Kabupaten/ Kota dan memberi keleluasaan untuk mengembangkan aturan lokal serta membuka peluang yang luas bagi pengembangan model desentralisasi berbasis kerakyatan bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan. Hal tersebut sangat sangat potensial untuk diterapkan di Kabupaten Boalemo, mengingat kedudukan wilayahnya yang secara geografis berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini yang menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, terutama untuk pengembangan perikanan tangkap. Teluk Tomini sendiri merupakan daerah ruaya ikan tuna dan ikan-ikan pelagis lainnya, berupa cakalang, tongkol, kembung dan layang serta beragam ikan demersal (ikan karang) lainnya. Ketersediaan potensi perikanan tangkap, khususnya untuk komoditas ikan tuna yang beruaya diperairan Teluk Tomini dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan komoditas ekspor non migas yang prospektif. Perairan Teluk Tomini yang memiliki banyak palung didasar laut, yang merupakan habitat yang sangat cocok bagi ikan tuna untuk mencari makanan dan bertelur. Oleh karena itu, potensi dan populasi ikan tuna yang ada tidak akan pernah punah, asalkan para nelayan penangkap tuna mampu menjaga kelestariannya. Kabupaten Boalemo juga merupakan salah satu distributor ikan terbesar di Provinsi Gorontalo dalam memenuhi kebutuhan ikan di daerah bahkan mampu menyediakan dan mendistribusikan ikan ke luar daerah Provinsi Gorontalo. Hal itu dibuktikan dengan makin berkembang pesatnya sektor perikanan tangkap serta tumbuh kembangnya pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Boalemo.

Kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Boalemo, khususnya sub sektor perikanan tangkap dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, terutama karena masih rendahnya tingkat pemanfaatan potensi yang ada dikarenakan minimnya teknologi dan keterampilan nelayan serta minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dimaksud, sehingga secara langsung berdampak pada stagnansi tingkat kesejahteraan dan pendapatan nelayan. Oleh karenanya, dalam usaha untuk menjaga keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan, pemerintah berupaya untuk memberikan perhatian dan beragam suplemen program bersifat khusus kepada masyarakat nelayan, antara lain berupa penyediaan armada penangkap ikan yang representatif (layak laut, layak tangkap dan layak simpan).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan kelompok nelayan

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Tersedianya Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan .
- Tercapainya produksi perikanan tangkap

C. Ruang Lingkup pekerjaan

terdiri dari :

- 1. Belanja Persediaan Untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember 2024

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Perencanaan													
2	Penyusunan RKA													
3	Koordinas Internal dan Eksternal													
4	Entri RKA													
5	Barang yang akan di serahkan													
6	Perjalanan dinas dalam daerah													

A. Rencana Penganggaran/Pembiayaan

Sumber dana dari DPA/DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2024 dengan rincian anggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berjumlah Rp. 2.288.000.000,-

Demikianlah KAK ini disusun agar menjadi pedoman dalam pengusulan

Boalemo, Desember 2023

PPTK

NIP 1981091 9200404 2 015

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan : Pemberdayaan Nelayaan Kecil Dalam Daerah

Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Rek. Kegiatan : 3.25.03.2.02

Capaian Program : Jumlah produksi Perikanan Tangkap 27.359 Ton

Yang Meningkat Hasilnya

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp

125.000.000

100%

Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang

Meningkat Kapasitasnya

Hasil : Persentase Fasilitasi dan pengembangan

lembagan usaha kelompok nelayan kecil

yang terbentuk : 100%

Kelompok Sasaran : Kelompok Nelayan

E. Latar Belakang

Upaya peningkatan partisipasi dan otonomi daerah yang merupakan substansi pokok, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengelola pesisir dan laut sejauh 12 mil untuk Provinsi dan 4 mil untuk daerah Kabupaten/ Kota dan memberi keleluasaan untuk mengembangkan aturan lokal serta membuka peluang yang luas bagi pengembangan model desentralisasi berbasis kerakyatan bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan. Hal tersebut sangat sangat potensial untuk diterapkan di Kabupaten Boalemo, mengingat kedudukan wilayahnya yang secara geografis berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini yang menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, terutama untuk pengembangan perikanan tangkap. Teluk Tomini sendiri merupakan daerah ruaya ikan tuna dan ikan-ikan pelagis lainnya, berupa cakalang, tongkol, kembung dan layang serta beragam ikan demersal (ikan karang) lainnya. Ketersediaan potensi perikanan tangkap, khususnya untuk komoditas ikan tuna yang beruaya diperairan Teluk Tomini dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan komoditas ekspor non migas yang prospektif. Perairan Teluk Tomini yang memiliki banyak palung didasar laut, yang merupakan habitat yang sangat cocok bagi ikan tuna untuk mencari makanan dan bertelur. Oleh karena itu, potensi dan populasi ikan tuna yang ada tidak akan pernah punah, asalkan para nelayan penangkap tuna mampu menjaga kelestariannya. Kabupaten Boalemo juga merupakan salah satu distributor ikan terbesar di Provinsi Gorontalo dalam memenuhi kebutuhan ikan di daerah bahkan mampu menyediakan dan mendistribusikan ikan ke luar daerah Provinsi Gorontalo. Hal itu dibuktikan dengan makin berkembang pesatnya sektor perikanan tangkap serta tumbuh kembangnya pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Boalemo.

Kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Boalemo, khususnya sub sektor perikanan tangkap dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, terutama karena masih rendahnya tingkat pemanfaatan potensi yang ada dikarenakan minimnya teknologi dan keterampilan nelayan serta minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dimaksud, sehingga secara langsung berdampak pada stagnansi tingkat kesejahteraan dan pendapatan nelayan. Oleh karenanya, dalam usaha untuk menjaga keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan, pemerintah berupaya untuk memberikan perhatian dan beragam suplemen program bersifat khusus kepada masyarakat nelayan, antara lain berupa penyediaan armada penangkap ikan yang representatif (layak laut, layak tangkap dan layak simpan).

F. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Kegiatan Penyediaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan kelompok nelayan

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Tersedianya nelayan yang berkualitas .
- Tercapainya produksi perikanan tangkap
- G. Ruang Lingkup pekerjaan

terdiri dari:

- 1. Belanja kegiatan kecakapan nelayan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

H. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember 2024

Time Scheedule Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Perencanaan													
2	Penyusunan RKA													
3	Koordinas Internal dan Eksternal													
6	Perjalanan dinas dalam daerah													

B. Rencana Penganggaran/Pembiayaan

Sumber dana dari DPA/DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun 2024 dengan rincian anggaran untuk kegiatan kecakapan nelayan Rp. 125.000.000

Demikianlah KAK ini disusun agar menjadi pedoman dalam pengusulan

Boalemo, Desember 2023

PPTK

NIP. 1981091 9200604 2 015

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Keci

Rek. Kegiatan : 3.25.04.2.02

Capaian Program : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang meningkat

hasilnya

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 125.000.000

Keluaran : Junlah Kelompok Pembudidaya ikan kecil

yang mengikuti pengembangan kapsitas 10 Kelompok

Hasil : Persentase penyediaan prasarana pembudidaya ikan

100%

2.346 Ton

Kelompok Sasaran : Kelompok Pembudidaya

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintrah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan dan penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Boalemo.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun 2024.
- C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup:

1. Penyusunan RKA APBD tahun 2024

2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

Tahapan kegiatan:

- 1. Menyiapkan SK Tim Penyusun
- 2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan.
- 3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan
- 4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
- 5. Rapat koordinasi internal dan eksternal

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara Pengadaan Langsung.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024

pencapaian vi

2. Tujuan

Kegiatan ini b

- Menyusun

Kabupater C. Ruang Lingku

Ruang lingkup

Time Scheedule Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Perencanaan													
2	Penyusunan RKA													
3	Koordinas Internal dan Eksternal													
4	Kegiatan													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

- 1. Belanja barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 340.000.000,-Terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pelatihan Pembudidaya

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Tilamuta, Desember 2024

PPTK

Firdja Saufika, S.Pi

NIP. 19831219 201101 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten / KotaRek. Kegiatan

Capaian Program : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang meningkat 2.346 Ton

hasilnya

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp. 526.000.000

Keluaran : Persentase Penyediaaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 100%

Pembudidayaan

Hasil : Tersediaanya Penyediaaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100%

Kelompok Sasaran : Kelompok Pembudidaya

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintrah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK)

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan dan penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Boalemo.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo tahun 2024.
- C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup:

1. Penyusunan RKA APBD tahun 2024

2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

Tahapan kegiatan:

- 1. Menyiapkan SK Tim Penyusun
- 2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan.
- 3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan
- 4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
- 5. Rapat koordinasi internal dan eksternal

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara Pengadaan Langsung.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024

pencapaian vi

2. Tujuan

Kegiatan ini b

- Menyusun Kabupater

C. Ruang Lingku

Ruang lingkup

Time Scheedule Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

														N
No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Perencanaan													
2	Penyusunan RKA													
3	Koordinas Internal dan Eksternal													
4	Entri RKA													
5	Barang yang di serahkan													
6	Perjalanan dinas dalam daerah													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 526.000.000,-

Terdiri dari:

- b. Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan
- 2. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan
- 3. Perjalanan dinas dalam daerah

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Tilamuta, Desember 2024

PPTK

Firdja Saufika, S.Pi

NIP. 19831219 201101 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri

Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Sub Kegiatan

Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

: 3.25.06.2.03.01 Rek. Kegiatan

: Nilai Tukar Nelayan Capaian Program 98.87%

Rata-Rata Konsumsi Ikan 46.36Kg/Kapita

/Tahun

Masukan : Jumlah dana yang tersedia : Rp 300.000.000

Keluaran 100% : Persentase Penyediaan dan

Penyaluran bahan baku pengolahan

ikan

: Tersedianya penyediaan dan Hasil

100 % penyaluran bahan baku pengolahan

ikan

Kelompok Sasaran : Masyarakat

I. LATAR BELAKANG

Pengadaan Sarana Motor Cool Box Untuk Pedagang Ikan Keliling ini merupakan mata anggaran Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang nantinya diharapkan dapat menunjang Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan aturan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 30 Tahun 2023 Tanggal 4 Januari 2024, sehingga program/kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis yang ada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pekerjaan/pengadaan barang ini adalah untuk mengadakan sarana Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Sarana Motor Cool Box Untuk Pedagang Ikan keliling sebanyak 10 (Sepuluh) Unit dengan sumber dana DAU pada APBD Tahun Anggaran 2024. Tujuan Pekerjaan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN:

Yang menjadi ruang lingkup kegiatan adalah fasilitas penunjang yang disediakan KPA: tidak ada

IV.WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2024 yaiu Anggaran Induk dari bulan Maret sampai dengan Juni 2024

Anggaran Perubahan dari bulan November 2024.

V.RENCANA PENGANGGARAN/PEMBIAYAAN:

Sumber dana dari : DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024. Total perkiraan biaya yang diperlukan pada Anggaran Induk :

Rp.1.885.000.000,- dengan rincian:

- a . Belanja Sarana dan prasarana terdiri dari Cool Box Uk. 60 Liter, Talenan, Pisau, Parang, Terompet Pompa, Rangka Box Fiber, Timbangan dan Gurinda/Batu Asa
- b. Belanja Modal Nihil.

Sumber dana dari : DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024. Total perkiraan biaya yang diperlukan,- dengan rincian :

- a. Belanja Sarana dan prasarana terdiri dari Cool Box Uk. 60 Liter, Talenan, Pisau, Parang,
 Terompet Pompa, Rangka Box Fiber, Timbangan dan Gurinda/Batu Asa
- b. Belanja Modal Nihil.

Time Scheedule Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1	Perencanaan													
2	Penyusunan RKA													
3	Koordinas Internal dan Eksternal													
4	Belanja modal													
5	Barang yang akan di serahkan													
6	Perjalanan dinas dalam daerah													

Demikian KAK ini disusun agar menjadi pedoman dalam pengusulan program kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tilamuta, Desember 2023

atch

RATNA MUHDIN S,Sos M.Si

NIP. 19750925 200604 2 014